RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
TAHUN 2023

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan serta penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4)
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 38

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II.	EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
	2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	61
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	62
	3.3. Program dan Kegiatan	65
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	80
BAB V.	PENUTUP	
	5.1. Catatan Penting	92
	5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	92
	5.3. Rencana Tindak Lanjut	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2021	11
Tabel 2.2	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan	12
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Riau	23
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama	33
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	34
Tabel 2.6	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024	36
Tabel 2.7	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024	36
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau	37
Tabel 2.9	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Riau	43
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Riau	59
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023	63
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Riau	71
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Riau	81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;

4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, progam dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

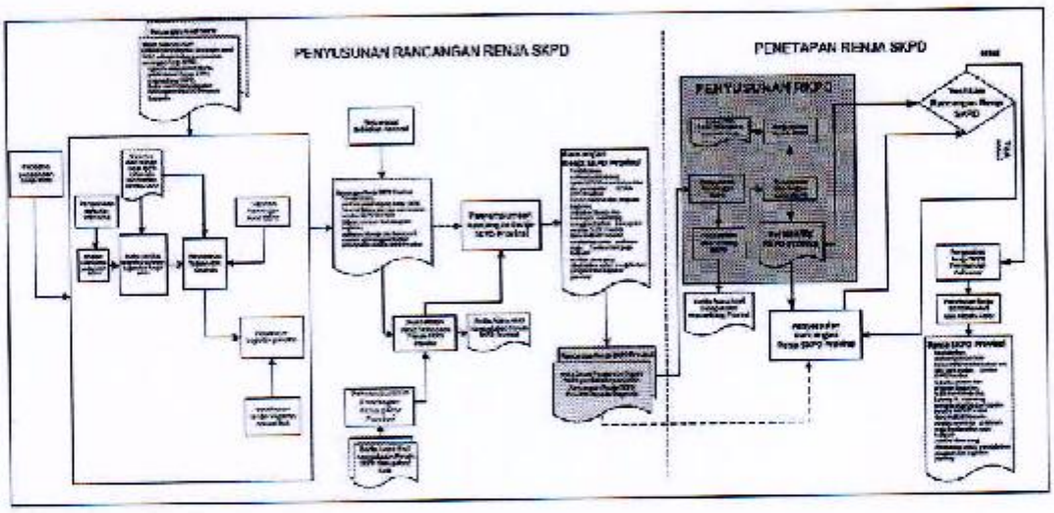

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunannya Rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang);
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, alur sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS) dapat dilihat pada gambar berikut ini :

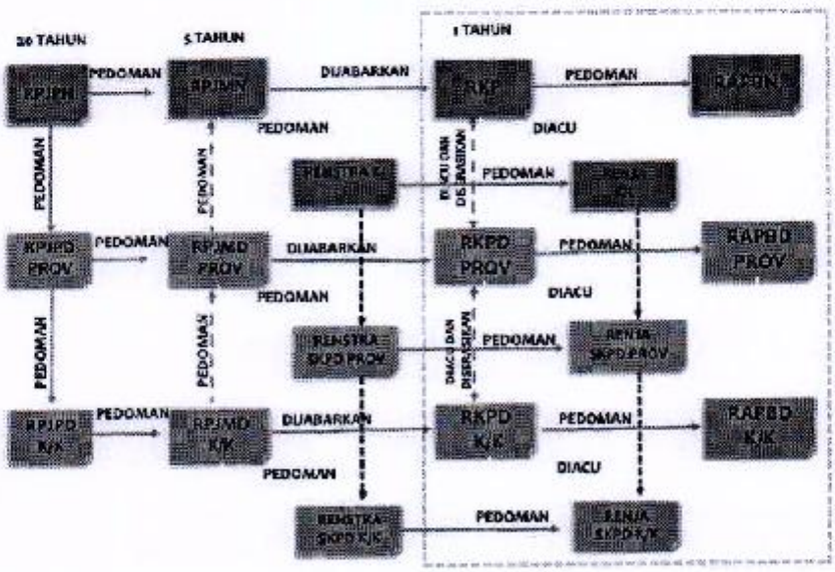

Gambar 1.2. Pola Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dalam rangka evaluasi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditentukan pada APBD Murni tahun berjalan untuk mewujudkan misi ke-5 Gubernur Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yaitu:

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi"

Sekretariat DPRD adalah salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau. Sekretariat DPRD mempunyai tugas "menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan".

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023 memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2023;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan substansi bab sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah dan mengemukakan pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar Isi dokumen.

Bab II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, revier terhadap rancangan awal RKPD, penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subtansi bab sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menguraikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan tabel TC.29;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dan lampiran table T-C.30;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menguraikan tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi

dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, lampiran tabel T-C.31;

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menguraikan Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, lampiran tabel T-C.32.

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan dengan subtansi bab sebagai berikut:

3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional menguraikan tentang penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembagunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah menguraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan menguraikan faktor- faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, lampiran tabel T-C.33

Bab IV Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan.

Bab V Penutup berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sebagaimana amanat Peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi keuangan program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021.

Tabel 2.1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	4
Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Riau	438.134.268.444,00	388.125.764.698,00	88,59
Total Belanja	**438.134.268.444,00**	**388.125.764.698,00**	**88,59**

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi anggaran Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 438.134.268.444,- dengan realisasinya sebesar Rp. 388.125.764.698,- atau 88,59%. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.

Dari Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 diperoleh Data Realisasi Keuangan sebagaimana dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALIASI KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
	4.02	SEKRETARIAT DPRD	438.134.268.444	388.125.764.698	88,59
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	155.349.564.701	137.741.863.658	88,67
I	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.362.132.228	24.562.632.570	96,85
1	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.362.132.228	24.562.632.570	96,85
II	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	273.000.000,00	257.272.125	94,24
2	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	273.000.000	257.272.125	94,24
III	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.495.542.889	20.268.461.440	73,72
3	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	345.672.630	222.414.500	64,34
4	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.854.694.039	10.670.352.522	63,31
5	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.025.720.000	5.558.779.500	92,25
6	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.238.969.220	843.377.370	68,07
7	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	394.525.000	343.835.988	87,15
8	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.635.962.000	2.629.701.560	99,76
IV	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.772.446.546	5.540.594.881	71,29
9	4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.772.446.546	5.540.594.881	71,29
V	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.906.168.128	12.635.527.472	90,86
10	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.477.000	94.152.000	93,71
11	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.518.648.600	3.018.813.021	85,79
12	4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	679.850.000	458.168.000	67,39
13	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.607.192.528	9.064.394.451	94,35
VI	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.234.085.400	8.678.565.200	77,25
14	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.630.000	161.260.350	71,16
15	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.153.010.400	873.561.640	75,76
16	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.961.425.000	6.861.846.897	76,57
17	4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	893.020.000	781.896.313	87,56
VII	4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	3.837.220.430	3.750.951.738	97,75
18	4.02.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3.837.220.430	3.750.951.738	97,75
VIII	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	62.828.969.080	59.601.466.592	94,86

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALIASI KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
19	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	61.002.424.425	57.888.213.842	94,89
20	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.435.250.000	1.349.212.750	94,01
21	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	391.294.655	364.040.000	93,03
IX	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	2.640.000.000	2.446.391.640	92,67
22	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.640.000.000	2.446.391.640	92,67
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	282.784.703.743	250.383.901.040	88,54
X	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	23.222.240.755	21.178.878.229	91,20
23	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6.074.527.655	5.872.256.955	96,67
24	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	17.147.713.100	15.306.621.274	89,26
XI	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.648.075.460	6.297.096.901	94,72
25	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	2.570.631.765	2.473.113.901	96,21
26	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1.934.097.760	1.899.612.000	98,22
27	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.143.345.935	1.924.371.000	89,78
XII	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.799.411.385	1.886.612.841	67,39
28	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.318.885.715	481.980.000	36,54
29	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.480.525.670	1.404.632.841	94,87
XIII	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	27.220.433.830	20.042.384.165	73,63
30	4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	5.981.046.520	3.154.639.100	52,74
31	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	13.252.128.660	11.951.318.504	90,18
32	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5.400.000.000	3.036.000.000	56,22
33	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	864.000.000	684.000.000	79,17
34	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.723.258.650	1.216.426.561	70,59
XIV	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	132.030.352.708	110.572.364.819	83,75
35	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	66.438.667.588	51.730.090.055	77,86
36	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	65.591.685.120	58.842.274.764	89,71
XV	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	90.864.189.605	90.406.564.085	99,50
37	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	70.536.143.605	70.183.732.593	99,50
38	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20.328.046.000	20.222.831.492	99,48

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi akomodasi Bimtek, Workshop, dan Seminar untuk menunjang wawasan

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.981.046.520,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 3.154.639.100,- atau 52,74% sedangkan realisasi fisik mencapai 62,73%;

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.362.132.228,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 24.562.632.570,- atau 96,85% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dilaksanakan dalam rangka untuk Aparatur Sipil Negara agar dapat meningkatkan kedisiplinan dalam berpakaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 257.272.125,- atau 94,24% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
3. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat kelistrikan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 345.672.630,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 222.414.500,- atau 64,34% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
4. Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang kualitas dan kuantitas tugas-tugas aparatur maupun Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.854.694.039,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 10.670.352.522,- atau 63,31% sedangkan realisasi fisik mencapai 72,75%;

5. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat/ kegiatan/ tamu Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau, rapat-rapat Sekretariat DPRD Provinsi Riau serta konsumsi acara-acara tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.025.720.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 5.558.779.500,- atau 92,25% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor menunjang kelancaran administrasi dan birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.238.969.220,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 843.377.370,- atau 68,07% sedangkan realisasi fisik mencapai 78,07%;
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.525.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 343.835.988,- atau 87,15% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan tugas-tugas koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.635.962.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.629.701.560,- atau 99,76% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
9. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah jabatan/dinas bagi Pimpinan DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.772.446.546,-.

Realisasi keuangan mencapai Rp. 5.540.594.881,- atau 71,29% sedangkan realisasi fisik mencapai 84,30%;

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan surat menyurat dan birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.477.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 94.152.000,- atau 93,71% sedangkan realisasi fisik mencapai 93,71%;
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan telepon, air dan listrik menunjang kelancaran aktifitas perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.518.648.600,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 3.018.813.021,- atau 85,79% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,49%;
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi peralatan dan perlengkapan HUT Provinsi Riau serta acara/resepsi Pimpinan DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 679.850.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 458.168.000,- atau 67,39% sedangkan realisasi fisik mencapai 81,84%;
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi kantor, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan jasa lainnya menunjang kelancaran aktifitas pelayanan perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.607.192.528,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 9.064.394.451,- atau 94,35% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,03%;
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan dalam rangka untuk pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan menunjang kelancaran tugas Pimpinan DPRD Provinsi Riau dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 226.630.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 161.260.350.,- atau 71,16% sedangkan realisasi fisik mencapai 81,16%;

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan dalam rangka untuk pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional menunjang kelancaran fungsi dan mobilitas instansi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.153.010.400,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 873.561.640,- atau 75,76% sedangkan realisasi fisik mencapai 81,03%;
16. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan dalam rangka untuk terpeliharanya fasilitas dan pemanfaatan gedung kantor serta fasilitas dan ketersediaan rumah jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.961.425.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 6.861.846.897,- atau 76,57% sedangkan realisasi fisik mencapai 87,89%;
17. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan dalam rangka untuk terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Pimpinan DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 893.020.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 781.896.313,- atau 87,56% sedangkan realisasi fisik mencapai 95,99%;
18. Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan dilaksanakan dalam rangka untuk memfasilitasi kegiatan dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.837.220.430,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 3.750.951.738,- atau 97,75% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,94%;

19. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.002.424.425,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 57.888.213.842,- atau 94,89% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,36%;
20. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dilaksanakan dalam rangka untuk tersedianya pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.435.250.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.349.212.750,- atau 94,01% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
21. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dilaksanakan dalam rangka untuk tersedianya layanan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 391.294.655,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 364.040.000,- atau 93,03% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,67%;
22. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi penyediaan logistik kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.640.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.446.391.640,- atau 92,67% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
23. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi kunjungan dan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD untuk menyusun rencana program legislasi daerah yang diparipurnakan setiap tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.074.527.655,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 5.872.256.955,- atau 96,67% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,93%;

24. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi agenda-agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.147.713.100,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 15.306.621.274,- atau 89,26% sedangkan realisasi fisik mencapai 90,06%;
25. Kegiatan Pembahasan APBD dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai Pembahasan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.570.631.765,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.473.113.901,- atau 96,21% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,49%;
26. Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai Pembahasan Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.934.097.760,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.899.612.000,- atau 98,22% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,33%;
27. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban ABPD dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.143.345.935,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.924.371.000,- atau 89,78% sedangkan realisasi fisik mencapai 90,23%;
28. Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.318.885.715,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 481.980.000,- atau 36,54% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,55%;

29. Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.480.525.670,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.404.632.841,- atau 94,87% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,70%;
30. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi publikasi dan dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.252.128.660,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 11.951.318.504,- atau 90,18% sedangkan realisasi fisik mencapai 97,79%;
31. Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kelompok pakar dan tim ahli untuk mendukung tugas-tugas DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.400.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 3.036.000.000,- atau 56,22% sedangkan realisasi fisik mencapai 83,33%;
32. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa tenaga ahli untuk mendukung tugas-tugas DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 864.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 684.000.000,- atau 79,17% sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%;
33. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyakarat dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan hubungan masyakarat kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.723.258.650,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.216.426.561,- atau 70,59% sedangkan realisasi fisik mencapai 92,45%;
34. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi hearing, sosialisasi peraturan daerah dan kunjungan kerja dalam

daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.438.667.588,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 51.730.090.055,- atau 77,86% sedangkan realisasi fisik mencapai 86,56%;

35. Kegiatan Pelaksanaan Reses dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.591.685.120,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 58.842.274.764,- atau 89,71% sedangkan realisasi fisik mencapai 94,16%;
36. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.536.143.605,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 70.183.732.593,- atau 99,50% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,55%;
37. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi tugas Pimpinan DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.328.046.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 20.222.831.492,- atau 99,48% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,96%.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2021 tidak ada Program/Kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1. Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi akomodasi Bimtek, Workshop, dan Seminar untuk menunjang wawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.981.046.520,-. Rendahnya Rendahnya Tingkat Capaian

Kinerja dan Anggaran dikarenakan selama pandemi Covid 19 tahun 2021, Pimpinan dan Anggota DPRD terhambat dalam pelaksanaan bimtek, kecuali mengikuti Bimtek yang bentuknya Parsial/ Bimtek Partai yang dikeluarkan atas Izin BPSDM.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Program/Kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak memenuhi target yang direncanakan akan mempunyai implikasi terhadap capaian Program/Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu :

1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tidak mencapai target yang diharapkan;
2. Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja tidak memenuhi target
3. Capaian sasaran program dan sasaran strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau juga tidak akan mencapai/memenuhi target yang direncanakan.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Efisiensi alokasi belanja;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target;
3. Penyesuaian target kinerja keluaran/hasil;
4. Merumuskan Kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PERMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (%)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
I	0.0.00.01.		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
II	0.0.00.02.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																					
III	0.0.00.03.		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																					
												4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Riau		1000	Orang	0	Orang	186	Orang	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	186	Orang	50	50	50	36	186	100,00 %	186	18,60
												4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	0.0.00.03.001.			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah pakaian dinas beserta	975	Stel	195	Stel	195	Stel	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah pakaian dinas beserta	390	Stel	0	0	390	0	390	100,00 %	780	40,00

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PERMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
				Perlengkapannya	perlengkapannya yang diadakan								Atribut Kelengkapannya	perlengkapannya yang diadakan										
	0.0.00.03.0 08.			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	975	Stel	195	Stel	195	Stel			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan										
												4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	0.0.00.01.009.			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	125	Jenis	25	Jenis	24	Jenis	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24	Jenis	0	24	0	0	24	100,00 %	49	39,20
	0.0.00.01.002.			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	300	Unit	0	Unit	60	Unit	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan,Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	326	Unit	0	74	100	63	237	72,70%	376	26,18
	0.0.00.01.007.			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	310	Jenis	62	Jenis	62	Jenis			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan										
	0.0.00.02.007.			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	750	Unit	65	Unit	2	Unit			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan										
	0.0.00.02.009.			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	76	Unit	12	Unit	234	Unit			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan										
	0.0.00.02.010.			Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1E+06	Porsi	243954	Porsi	23617	Porsi	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	28617	Porsi	7179	7179	7179	7179	286.316	100,00 %	590.270	40,12

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PERMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
	4.0.02.15.0 04.			Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	1710	Kali	340	Kali	162	Kali													
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	305	Kali	0	Kali	61	Kali													
				Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	15	Kali	0	Kali	3	Kali													
	0.0.00.01.0 08.			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	875	Jenis	145	Jenis	148	Jenis	4.02.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	148	Jenis	0	32	38	46	116	78,38%	261	29,83
				Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	1710	Kali	0	Kali	162	Kali													
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	305	Kali	0	Kali	51	Kali													
	4.0.02.15.0 25.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	6250 00	Eksemplar	9074 5	Eksemplar	6840 0	Eksemplar	4.02.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	6287 7	Eksemplar	171 00	171 00	1710 0	11.5 77	62.877	100,00 %	153.62 7	24,58
	0.0.00.01.0 11.			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	140	Kali	60	Kali	51	Kali	4.02.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51	Kali	12	12	14	13	51	100,00 %	111	79,29
												4.02.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODE KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
	0.0.00.02.005.			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	100	Unit	18	Unit	15	Unit	4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	200	Unit	0	5	5	151	169	84,50%	214	108,08
	0.0.00.02.008.			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	98	Unit	27	Unit	15	Unit			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan										
												4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	0.0.00.01.001.			Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	435138	Surat	80701	Surat	84046	Surat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	84046	Surat	19690	19690	19690	19690	78.760	93,71%	159.461	36,63
	0.0.00.01.002.			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	260	Rekening	52	Rekening	52	Rekening		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	52	Rekening	13	13	13	13	52	100,00 %	104	40,00
	4.0.02.15.022.			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	25	Jenis	5	Jenis	5	Jenis		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	5	Jenis	1	1	1	1	4	80,00%	9	36,00
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	305	Kali	0	Kali	61	Kali													
	0.0.00.01.004.			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00 %	24	40,00
	0.0.00.01.012.			Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	24110	Org	4685	Org	1484	Org			Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan										
	0.0.00.01.013.			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	4260	Org	852	Org	720	Org			Jumlah tenaga satpam yang disediakan										
	4.0.02.15.005.			Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	305	Kali	58	Kali	61	Kali													

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PENETAPAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	15	Kali	0	Kali	9	Kali													
	4.0.02.19.0 21.			Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	15	Jasa	1	Jasa	1	Jasa													
												4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	0.0.00.01.006.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	290	Unit	58	Unit	56	Unit	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5	Unit	1	1	1	1	4	80,00%	9	36,00
	0.0.00.02.0 14.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	102	Unit	38	Unit	35	Unit	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	40	Unit	2	5	10	15	32	80,00%	123	28,81
	0.0.00.02.0 20.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	12	Unit	4	Unit	4	Unit	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	5	Unit	0	1	1	2	4	80,00%	9	52,94
	0.0.00.02.0 12.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	5	Ruang	1	Ruang	1	Ruang			Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara										
	0.0.00.02.0 15.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	20	Unit	4	Unit	321	Unit	4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	487	Unit	0	150	160	157	467	95,89%	485	444,55
	0.0.00.02.0 16.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung	90	Unit	18	Unit	388	Unit			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara										

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022												PERMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIUMUMKAN SD TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
					kantor yang dipelihara																			
												4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan											
	4.0.02.15.013.			Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	1500	Kali	299	Kali	195	Kali	4.02.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	184	Kali	20	97	45	22	184	100,00 %	493	32,20
												4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											
				Belanja DPRD Provinsi Riau		325	Orang	0	Orang	65	Orang	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinandan Anggota DPRD	65	Orang	20	15	15	15	65	100,00 %	65	20,00
	4.0.02.15.015.			Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	1950	Stel	325	Stel	325	Stel	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	325	Stel	0	65	70	190	325	100,00 %	650	33,33
	4.0.02.15.010.			Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	15	Kali	3	Kali	3	Kali													
	4.0.02.15.011.			Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	325	Orang	65	Orang	65	Orang	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	65	Orang	0	0	0	65	65	100,00 %	130	40,00
												4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD											
	4.0.02.15.014.			Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00 %	24	40,00

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PERMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA BULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIPAMAN AI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
					Pimpinan DPRD																			
IV	4.0.02.15.		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
												4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD											
	4.0.02.15.001.			Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	10	Dokumen	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	2	2	2	5	11	100,00 %	11	220,00
	4.0.02.15.002.			Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	38	Ranperda Inisiatif DPRD	5	Ranperda Inisiatif DPRD	5	Ranperda Inisiatif DPRD	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	15	Ranperda	2	2	3	7	14	93,33%	25	32,89
	4.0.02.15.003.			Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	98	Ranperda	6	Ranperda	5	Ranperda			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas										
												4.02.02.1.01	Pembahasan Kebijakan Anggaran											
	4.0.02.15.007.			Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan rekomendasi	25	Perda/ Rekomendasi	5	Perda/ Rekomendasi	5	Perda/ Rekomendasi	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Perda APBD	1	Perda	0	0	0	1	1	100,00 %	6	24,00
												4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD Perubahan	1	Perda	0	0	0	1	1	100,00 %	1	4,00

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODE RIKAS	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODE RIKAS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
												4.02.02.1.02.05	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1	Perda	0	0	1	0	1	100,00 %	1	4,00
												4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											
												4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut LHP BPK RI	1	Rekomendasi	0	0	1	0	1	100,00 %	1	4,00
												4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Rekomendasi	0	0	1	0	1	100,00 %	1	4,00
												4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD											
	4.0.02.15.018.			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	15	Kali	3	Kali	3	Kali	4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	5	Kali	0	1	1	1	3	60,00%	6	40,00
	4.0.02.15.016.			Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rentang waktu publikasi dan dokumentasi dewan	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00 %	24	40,00
	4.0.02.15.009.			Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan	310	Orang	46	Orang	71	Orang	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang disediakan	75	Orang	0	20	28	14	62	82,67%	108	40,00
								8				4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	8	Orang	0	4	2	2	8	100,00 %	16	40,00

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PENJUTAN/HIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rentang waktu penyelenggaraan hubungan masyarakat	12	Bulan	3	3	3	3	12	100,00 %	12	20,00
												4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											
	4.0.02.15.008.			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	267	Kali	41	Kali	99	Kali	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	68	Kali	2	14	10	22	48	100,00 %	102	30,72
	4.0.02.15.017.			Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan	65	Kali	13	Kali	6	Kali			Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan										
	4.0.02.15.012.			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	286	Kali	0	Kali	47	Kali													
	4.0.02.15.006.			Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	15	Kali	5	Kali	2	Kali	4.02.02.1.09.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3	Kali	0	1	1	1	3	100,00 %	6	40,00
												4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD											
	4.0.02.15.012.			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	286	Kali	41	Kali	47	Kali	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	59	kali	4	18	17	20	59	100,00 %	100	3,50
	4.0.02.15.019.			Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	5	Kali	0	Kali	1	Kali													

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021												PENJUTAHKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (%)
NO	KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
	4.0.02.15.D 20.			Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	325	Dokumen	42	Dokumen	65	Dokumen													
	4.0.02.15.0 08.			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	267	Kali	0	Kali	39	Kali													
	4.0.02.15.0 12.			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	256	Kali	0	Kali	47	Kali	4.02.02.1.0 8.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	69	kali	R	22	12	27	68	100,00 %	69	24,13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* adalah serangkaian indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Dalam Renstra Tahun 2019-2024, Sekretariat DPRD Provinsi Riau menyusun formulasi indikator-indikator kinerja serta merumuskan Indikator Kinerja Utama berdasarkan rangkaian indikator kinerja program/kegiatan. Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	Indeks Kepuasan Layanan (poin)	Jumlah Nilai Kepuasan Layanan/Jumlah Anggota DPRD x 100%
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD) x 100%
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD) x 100%
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD) x 100%

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD) x 100%
6	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi = (Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan) x 100%

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu *reformasi birokrasi* melalui strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Integritas Aparatur, serta Akuntabilitas dalam melayani tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan indikator kinerja setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR/KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								
Indeks Kepuasan Layanan (poin)	72	73	74	75	76	77	77	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR/KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	0	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	0	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	0	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	0	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	90	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	0	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beranggotakan 65 Orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Riau terdiri dari 1 (satu) Orang Ketua dan 3 (tiga) Orang Wakil Ketua yang berasal dari Partai Politik dengan jumlah kursi terbanyak. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau saat ini berdasarkan Partai Politik dan Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau Sesuai Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrat	8	1	9
Partai Golongan Karya	7	4	11
Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	2	10
Partai Gerakan Indonesia Raya	8	0	8
Partai Amanat Nasional	5	2	7
Partai Nasdem	1	1	2
Partai Kebangkitan Bangsa	6	0	6
Partai Keadilan Sejahterah	5	2	7
Partai Bulan Bintang	0	0	0
Partai Persatuan Pembangunan	4	0	4
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0
Provinsi Riau	**53**	**12**	**65**

Tabel 2.7
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau Sesuai Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024

Kab/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kuantan Singingi	34	1	35
Indragiri Hulu	39	1	40
Indragiri Hilir	39	6	45
Pelalawan	35	0	35
Siak	39	1	40
Kampar	41	4	45
Rokan Hulu	43	2	45
Bengkalis	41	4	45
Kep. Meranti	37	8	45
Rokan Hilir	26	4	30
Pekanbaru	90	20	110
Dumai	27	3	30
Provinsi Riau	**53**	**12**	**65**

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK		TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau		Indeks Kepuasan Layanan (Point)	73	74	75	76	77	75,02	-	75	76	

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 bahwa di Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Riau menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan sebesar 75,02 Point.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja oleh tim melalui metode survey kepada 65 anggota DPRD, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan layanan di akhir tahun 2021 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 75,02 Point atau kategori BAIK.

Metode yang digunakan untuk memperoleh angka indeks tersebut dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur pelayanan umum yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan memperhatikan 12 unsur pelayanan antara lain :

a. Persyaratan pelayanan;
b. Kemudahan Prosedur Pelayanan;
c. Kecepatan Pelayanan;
d. Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan dan Standar Pelayanan;
e. Keseuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
f. Kemampuan petugas dalam pelayanan;
g. Kesopanan dan keramahan petugas;
h. Kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan yang diberikan dengan maklumat yang ditetapkan;
I. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Sedangkan untuk unsur pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan meliputi:

a. Pelayanan dalam bidang umum
b. Pelayanan dalam bidang risalah dan produk hukum

c. Pelayanan dan bidang keuangan dan perencanaan

Perolehan angka indeks dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau di Tahun 2021 mempunyai nilai kinerja sebesar berada dalam 75,02 Point kategori BAIK.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau di tahun 2021 yaitu sebesar 74 Point telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 1,02 Point.

Untuk lebih detailnya, capaian kinerja sebesar 75,02 Point dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 73,95 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
b. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Risalah dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 73,07 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
c. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 72,95 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 3 (tiga) bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat diketahui bahwa 3 (tiga) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-baian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD. Serta apabila ke

3 (tiga) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 75,02.

Diharapkan ditahun 2022 dan 2023 Program dan Kegiatan menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD sehingga dapat lebih meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Terhadap DPRD.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah :

Faktor Internal :

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal;
b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
d. Layanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD masih kategori baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini tentunya akan memacu Sekretariat DPRD dalam melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan.

Faktor Eksternal :

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
2. Melakukan formasi pegawai secara efektif dan efisien guna mendukung kinerja SKPD;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Adapun rekomendasi dan catatan strategis yang dapat diangkat dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja guna mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan arahan/panduan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, yang kemudian dibahas secara bersama-sama melalui Forum Perangkat Daerah, untuk kemudian dibahas pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DRPD Provinsi Riau

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**124.085.861.772**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**154.606.954.435**	
001	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6**	**Dokumen**	**1.125.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0**	**Dokumen**	**-**	
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	-	
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	-	
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	-	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	-	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	-	
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	-	
002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**7**	**Laporan**	**25.505.229.976**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**1**	**Laporan**	**26.180.521.648**	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	25.205.229.976	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	26.180.521.648	
0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	Laporan	-	
0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	Laporan	-	
0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dokumen	-	
003	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola**	**2**	**Laporan**	**450.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola**	**0**	**Laporan**	-	
0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	-	
0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	100.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	-	
0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	
0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	
004	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi**	**2**	**Jenis**	**462.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi**	**1**	**Jenis**	**280.000.000**	
0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	312.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	280.000.000	
0002	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*	*(12)*
005	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi**	**10**	**Jenis**	**7.066.721.601**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi**	**7**	**Jenis**	**16.240.703.342**	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	345.671.758	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	344.013.830	
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	1.077.589.843	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	7.576.269.512	
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	200.000.000	
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.409.460.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.848.220.000	
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	449.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000.000	
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	410.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	322.200.000	
0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pekanbaru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pekanbaru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Laporan	-	
0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	48	Laporan	1.950.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	48	Laporan	1.950.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD				dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
0009	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	75.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Dokumen	-	
0010	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	-	
006	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**8**	**Jenis**	**11.950.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**8**	**Jenis**	**14.957.235.938**	
0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	4.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	4.000.000.000	
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pekanbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	5.200.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pekanbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	5.200.000.000	
0003	Pengadaan Mebel	Pekanbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Paket	200.000.000	Pengadaan Mebel	Pekanbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Paket	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	300.000.000	
0005	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pekanbaru	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	Unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pekanbaru	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	Unit	100.000.000	
0006	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	500.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	500.000.000	
0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35	Unit	1.500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35	Unit	1.500.000.000	
0008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	3.157.235.938	
007	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi**	**4**	Jenis	**7.350.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi**	**4**	**Jenis**	**18.336.074.912**	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	275	Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	275	Laporan	102.825.000	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	52	Laporan	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	52	Laporan	4.094.587.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Air dan Listrik yang Disediakan						Air dan Listrik yang Disediakan				
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	729.850.000	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5.580.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	13.408.812.912	
008	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**7**	**Jenis**	**4.339.486.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**7**	**Jenis**	**13.224.994.400**	
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	226.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	226.630.000	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69	Unit	2.056.310.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69	Unit	1.153.010.400	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Operasional atau Lapangan						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
0003	Pemeliharaan Mebel	Pekanbaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Pekanbaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	50.000.000	
0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	50.000.000	
0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.081.546.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	10.870.354.000	
0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	Unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	Unit	125.000.000	
0007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	750.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	750.000.000	
009	**Fasilitasi Keprotokolan**		**Frekuensi Keprotokolan yang difasilitasi**	**0**	**Laporan**	-	**Fasilitasi Keprotokolan**		**Frekuensi Keprotokolan yang difasilitasi**	**0**	**Laporan**	-	
0001	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pekanbaru	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0	Laporan	-	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pekanbaru	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0	Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
010	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya**	**65**	**Orang**	**62.747.424.195**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya**	**65**	**Orang**	**62.747.424.195**	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12	Bulan	61.002.424.425	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12	Bulan	61.002.424.425	
0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	Paket	1.350.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	Paket	1.350.000.000	
0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65	Orang	394.999.770	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pekanbaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65	Orang	394.999.770	
011	**Layanan Administrasi DPRD**		**Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi**	**4**	**Jenis**	**3.090.000.000**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi**	**1**	**Jenis**	**2.640.000.000**	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10	Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	Dokumen	-	
0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8	Laporan	200.000.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0	Laporan	-	
0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5	Laporan	200.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0	Laporan	-	
0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pekanbaru	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	Paket	2.640.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pekanbaru	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	Paket	2.640.000.000	
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN**		**Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**Persen**	**143.577.539.428**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN**		**Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**Persen**	**236.957.433.750**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD						**TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						
001	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**10**	**Perda**	**13.082.960.000**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**10**	**Perda**	**19.120.837.500**	
0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	4.500.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	5.164.982.500	
0002	Pembahasan Rancangan Perda	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12	Dokumen	5.000.000.000	Pembahasan Rancangan Perda	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12	Dokumen	11.855.855.000	
0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12	Dokumen	1.482.960.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	Dokumen	-	
0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	10	Dokumen	1.600.000.000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	10	Dokumen	1.600.000.000	
0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	5	Dokumen	500.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	5	Dokumen	500.000.000	
002	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**3**	**Perda**	**6.600.000.000**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**3**	**Perda**	**5.500.000.000**	
0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	1.100.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	1.100.000.000	
0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	1.100.000.000	Pembahasan Perubahan KUA	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	1.100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							dan Perubahan PPAS						
0003	Pembahasan APBD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	1.100.000.000	Pembahasan APBD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	1.100.000.000	
0004	Pembahasan Perubahan APBD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	Dokumen	1.100.000.000	Pembahasan Perubahan APBD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	Dokumen	1.100.000.000	
0005	Pembahasan Laporan Semester	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	Dokumen	1.100.000.000	Pembahasan Laporan Semester	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0	Dokumen	-	
0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	1.100.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	1.100.000.000	
003	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**8**	**Jenis**	**20.600.000.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**8**	**Jenis**	**20.600.000.000**	
0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	Laporan	3.250.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	Laporan	3.250.000.000	
0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Laporan	3.350.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Laporan	3.350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pekanbaru	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Laporan	3.150.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pekanbaru	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Laporan	3.150.000.000	
0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	Laporan	3.050.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	Laporan	3.050.000.000	
0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	Laporan	3.650.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	Laporan	3.650.000.000	
0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen	1.350.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen	1.350.000.000	
0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Dokumen	1.200.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Dokumen	1.200.000.000	
0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	1.600.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	1.600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
004	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD**	**5**	**Jenis**	**15.028.424.610**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD**	**5**	**Jenis**	**31.720.101.630**	
0001	Orientasi DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dokumen	300.000.000	Orientasi DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	Dokumen	-	
0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	Dokumen	5.531.024.800	Pendalaman Tugas DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	Dokumen	4.532.456.800	
0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	2.183.399.810	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	16.360.903.990	
0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pekanbaru	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	75	Orang	3.500.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pekanbaru	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	75	Orang	4.000.000.000	
0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang	864.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang	864.000.000	
0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	1.200.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	4.512.740.840	
0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	1.450.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	1.450.000.000	
005	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3**	**Jenis**	**49.535.575.390**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3**	**Jenis**	**90.324.872.730**	
0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	55	Laporan	9.686.575.730	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	55	Laporan	35.487.679.700	
0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dokumen	1.450.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dokumen	1.450.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
0003	Pelaksanaan Reses	Pekanbaru	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	38.398.999.660	Pelaksanaan Reses	Pekanbaru	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	53.387.193.030	
006	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Jumlah Jenis Pengawasan Kode Etik DPRD**	**1**	**Jenis**	**1.000.000.000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Jumlah Jenis Pengawasan Kode Etik DPRD**	**1**	**Jenis**	**1.000.000.000**	
0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pekanbaru	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Dokumen	500.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pekanbaru	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Dokumen	500.000.000	
0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Laporan	500.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Laporan	500.000.000	
007	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Jumlah Jenis Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**2**	**Jenis**	**1.870.000.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Jumlah Jenis Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**2**	**Jenis**	**1.870.000.000**	
0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12	Dokumen	895.000.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12	Dokumen	895.000.000	
0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	Dokumen	975.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	Dokumen	975.000.000	
008	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD**	**5**	**Jenis**	**35.860.579.428**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD**	**4**	**Jenis**	**66.821.621.890**	
0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	148	Dokumen	21.643.539.428	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	148	Dokumen	50.965.985.000	
0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	Laporan	100.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0	Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*		*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*	*(12)*
0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	Dokumen	2.200.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	Dokumen	2.200.000.000	
0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	57	Dokumen	9.000.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	57	Dokumen	10.738.596.890	
0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1	Dokumen	2.917.040.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1	Dokumen	2.917.040.000	
						267.663.401.200						**391.564.388.185**	

Berdasarkan Tabel Setelah dilakukan perumusan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau terdapat penyesuaian kebutuhan anggaran dari total Pagu Indikatif Rp. 267.663.401.200,- menjadi Rp. 391.564.388.185,- Hasil analisa kebutuhan tersebut berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Adapun pagu anggaran per program yang dilakukan penyesuaian terhadap hasil analisa kebutuhan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 124.085.861.772,- bertambah menjadi RP. 154.606.954.435,-;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 143.577.539.428,- bertambah menjadi Rp. 236.957.433.750,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan dan dukungan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Riau

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, karena tidak memiliki hubungan hierarki dan kepentingan secara langsung.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya, layanan public serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yaitu :

a. Visi : Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)
b. Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
c. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rkayat Daerah Provinsi Riau
d. Sasaran :
   - Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD;
   - Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD;
   - Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD;

- Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD;
- Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau.

e. Strategi :

- Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan tugas DPRD;
- Meningkatkan tata laksana pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan tugas DPRD;
- Menyelenggarakan peningkatan kapasitas DPRD Provinsi Riau sesuai dengan perkembangan dan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

f. Kebijakan :

- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan tugas DPRD;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi sesuai dengan perkembangan/ perubahan peraturan dan perundang-undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretaris DPRD Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris DPRD Provinsi Riau memiliki fungsi menyelenggarakan seperti; fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Target capaian pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 mengacu pada Penetapan Kinerja pada Tahun 2022 yang dihubungkan dengan RKPD 2023. Dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	1. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD; 2. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD; 3. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD; 4. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD; 5. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau juga disusun melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2021 dengan

membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan sesuai kondisi ekonomi daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah;

   Rencana efisiensi belanja Sekretariat DPRD Provinsi Riau sesuai kebijakan rasionalisasi anggaran terhadap menurunnya kemampuan keuangan daerah dan penyesuaian prioritas anggaran daerah.

2. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan tersebut berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada dipandang perlu melakukan penyesuaian belanja untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pelayanan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau. Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut harus didukung dengan efektifitas belanja kegiatan melalui review anggaran kegiatan dan pelaporan.

4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi. Untuk meningkatkan capaian kinerja dengan kemampuan keuangan yang makin menurun memerlukan perencanaan kinerja dan anggaran yang efektif. Sehingga Perangkat Daerah dituntut lebih selektif dalam distribusi anggaran program/kegiatan. Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau akan

melakukan efisensi belanja modal dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis pada tahun 2023 maka, dirumuskan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023. Secara keseluruhan rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang diusulkan pada tahun 2023 berjumlah 2 Program, 19 Kegiatan dan 95 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya pelayanan adminstrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas-tugas kesekretariatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Aset Tak Berwujud;

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Mebel;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

i. Fasilitasi Keprotokolan
- Pengelolaan Hubungan Keprotokolan;

j. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

k. Layanan Administrasi DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- Fasilitasi Fraksi DPRD;

- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD melalui pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan fasilitasi agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Pembahasan Rancangan Perda;
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik;
- Penyusunan Tata Tertib DPRD

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pembahasan KUA dan PPAS;
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- Pembahasan APBD;
- Pembahasan Perubahan APBD;
- Pembahasan Laporan Semester;
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- Pengawasan Penggunaan Anggaran;

- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Orientasi DPRD;
- Pendalaman Tugas DPRD;
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
- Penyusunan Program Kerja DPRD;

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Kunjungan Kerja dalam Daerah;
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- Pelaksanaan Reses;

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Penyusunan Kode Etik DPRD;
- Pengawasan Kode Etik DPRD;

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah;
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

h. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Adapun rumusan rencana kegiatan per program pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023 diukur melalui Indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nilai target tahun 2023 untuk masing-masing sasaran strategis ditetapkan sesuai target capaian yang dinyatakan dalam

angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi kepada indikator kinerja sasaran.

Secara garis besar Perumusan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023 dengan Rancangan Awal RKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau tidak terdapat perbedaan pada total pagu indikatif.

Penetapan target kinerja dan pagu anggaran berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Target kinerja dan pagu anggaran untuk masing-masing program/kegiatan yang hendak dicapai dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir didalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Riau berikut :

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Tahun n			Target Capaian Kinerja		Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7	(8)	(9)		(10)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100**	**Persen**	**124.085.861.772**			**100**	**Persen**	**136.494.447.949**
001	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**6**	**Dokumen**	**1.125.000.000**			**6**	**Dokumen**	**1.237.500.000**
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pekanbaru	2	Dokumen	125.000.000			2	Dokumen	137.500.000
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pekanbaru	1	Dokumen	175.000.000			1	Dokumen	192.500.000
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pekanbaru	1	Dokumen	175.000.000			1	Dokumen	192.500.000
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pekanbaru	1	Dokumen	175.000.000			1	Dokumen	192.500.000
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pekanbaru	1	Dokumen	175.000.000			1	Dokumen	192.500.000
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	1	Laporan	150.000.000			1	Laporan	165.000.000
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pekanbaru	1	Laporan	150.000.000			1	Laporan	165.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n			Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7	(8)	(9)	(10)
002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi**		**7 Laporan**	**25.505.229.976**			**7 Laporan**	**28.055.752.974**
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pekanbaru	12 Bulan	25.205.229.976			12 Bulan	27.725.752.974
0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekanbaru	4 Dokumen	50.000.000			4 Dokumen	55.000.000
0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pekanbaru	1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	55.000.000
0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pekanbaru	6 Laporan	100.000.000			6 Laporan	110.000.000
0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pekanbaru	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	110.000.000
003	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola**		2 Laporan	**450.000.000**			**2 Laporan**	**495.000.000**
0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	2 Dokumen	100.000.000			2 Dokumen	110.000.000
0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	2 Dokumen	100.000.000			2 Dokumen	110.000.000
0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pekanbaru	1 Laporan	100.000.000			1 Laporan	110.000.000
0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	55.000.000
0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Tahun n			Target Capaian Kinerja		Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pekanbaru	1	Laporan	50.000.000			1	Laporan	55.000.000
004	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi**		**2**	**Jenis**	**462.000.000**			**2**	**Jenis**	**508.200.000**
0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pekanbaru	2	Paket	312.000.000			2	Paket	343.200.000
0002	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	50	Orang	150.000.000			50	Orang	165.000.000
005	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi**		**10**	**Jenis**	**7.066.721.601**			**10**	**Jenis**	**7.773.393.761**
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	1	Paket	345.671.758			1	Paket	380.238.934
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	24	Paket	1.077.589.843			24	Paket	1.185.348.827
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pekanbaru	10	Paket	200.000.000			10	Paket	220.000.000
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	1	Paket	2.409.460.000			1	Paket	2.650.406.000
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pekanbaru	1	Paket	449.000.000			1	Paket	493.900.000
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pekanbaru	12	Dokumen	410.000.000			12	Dokumen	451.000.000
0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pekanbaru	1	Laporan	100.000.000			1	Laporan	110.000.000
0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pekanbaru	48	Laporan	1.950.000.000			48	Laporan	2.145.000.000
0009	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pekanbaru	1	Dokumen	75.000.000			1	Dokumen	82.500.000
0010	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pekanbaru	1	Dokumen	50.000.000			1	Dokumen	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n			Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7	(8)	(9)	(10)
006	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**		**8 Jenis**	**11.950.000.000**			**8 Jenis**	**13.145.000.000**
0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pekanbaru	4 Unit	4.000.000.000			4 Unit	4.400.000.000
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pekanbaru	13 Unit	5.200.000.000			13 Unit	5.720.000.000
0003	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pekanbaru	10 Paket	200.000.000			10 Paket	220.000.000
0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	30 Unit	300.000.000			30 Unit	330.000.000
0005	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pekanbaru	2 Unit	100.000.000			2 Unit	110.000.000
0006	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	2 Unit	500.000.000			2 Unit	550.000.000
0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	35 Unit	1.500.000.000			35 Unit	1.650.000.000
0008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pekanbaru	15 Unit	150.000.000			15 Unit	165.000.000
007	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi**		**4 Jenis**	**7.350.000.000**			**4 Jenis**	**8.085.000.000**
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	275 Laporan	70.000.000			275 Laporan	77.000.000
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pekanbaru	52 Laporan	1.600.000.000			52 Laporan	1.760.000.000
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	5 Laporan	100.000.000			5 Laporan	110.000.000
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	12 Laporan	5.580.000.000			12 Laporan	6.138.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Tahun n			Target Capaian Kinerja		Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7	(8)	(9)		(10)
008	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**		**7**	**Jenis**	**4.339.486.000**			**7**	**Jenis**	**4.773.434.600**
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pekanbaru	10	Unit	226.630.000			10	Unit	249.293.000
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pekanbaru	69	Unit	2.056.310.000			69	Unit	2.261.941.000
0003	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pekanbaru	30	Unit	50.000.000			30	Unit	55.000.000
0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pekanbaru	25	Unit	50.000.000			25	Unit	55.000.000
0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekanbaru	5	Unit	1.081.546.000			5	Unit	1.189.700.600
0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekanbaru	50	Unit	125.000.000			50	Unit	137.500.000
0007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pekanbaru	100	Unit	750.000.000			100	Unit	825.000.000
009	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Frekuensi Keprotokolan yang difasilitasi**		**0**	**Laporan**	**-**			**0**	**Laporan**	**-**
0001	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pekanbaru	0	Laporan	-			0	Laporan	-
010	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya**		**65**	**Orang**	**62.747.424.195**			**65**	**Orang**	**69.022.166.615**
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Pekanbaru	12	Bulan	61.002.424.425			12	Bulan	67.102.666.868
0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Pekanbaru	5	Paket	1.350.000.000			5	Paket	1.485.000.000
0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pekanbaru	65	Orang	394.999.770			65	Orang	434.499.747

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Tahun n			Target Capaian Kinerja		Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7	(8)	(9)		(10)
011	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi**		**4**	**Jenis**	**3.090.000.000**			**4**	**Jenis**	**3.399.000.000**
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Pekanbaru	10	Dokumen	50.000.000			10	Dokumen	55.000.000
0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Pekanbaru	8	Laporan	200.000.000			8	Laporan	220.000.000
0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pekanbaru	5	Laporan	200.000.000			5	Laporan	220.000.000
0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Pekanbaru	1	Paket	2.640.000.000			1	Paket	2.904.000.000
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		**100**	**Persen**	**143.577.539.428**			**100**	**Persen**	**157.935.293.371**
001	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**10**	**Perda**	**13.082.960.000**			**10**	**Perda**	**14.391.256.000**
0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pekanbaru	10	Dokumen	4.500.000.000			10	Dokumen	4.950.000.000
0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Pekanbaru	12	Dokumen	5.000.000.000			12	Dokumen	5.500.000.000
0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Pekanbaru	12	Dokumen	1.482.960.000			12	Dokumen	1.631.256.000
0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Pekanbaru	10	Dokumen	1.600.000.000			10	Dokumen	1.760.000.000
0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Pekanbaru	5	Dokumen	500.000.000			5	Dokumen	550.000.000
002	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**3**	**Perda**	**6.600.000.000**			**3**	**Perda**	**7.260.000.000**
0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pekanbaru	2	Dokumen	1.100.000.000			2	Dokumen	1.210.000.000
0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pekanbaru	2	Dokumen	1.100.000.000			2	Dokumen	1.210.000.000
0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pekanbaru	1	Dokumen	1.100.000.000			1	Dokumen	1.210.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Tahun n			Target Capaian Kinerja		Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7	(8)	(9)		(10)
0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Pekanbaru	1	Dokumen	1.100.000.000			1	Dokumen	1.210.000.000
0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pekanbaru	2	Dokumen	1.100.000.000			2	Dokumen	1.210.000.000
0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pekanbaru	1	Dokumen	1.100.000.000			1	Dokumen	1.210.000.000
003	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**8**	**Jenis**	**20.600.000.000**			**8**	**Jenis**	**22.660.000.000**
0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pekanbaru	12	Laporan	3.250.000.000			12	Laporan	3.575.000.000
0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pekanbaru	12	Laporan	3.350.000.000			12	Laporan	3.685.000.000
0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pekanbaru	12	Laporan	3.150.000.000			12	Laporan	3.465.000.000
0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pekanbaru	12	Laporan	3.050.000.000			12	Laporan	3.355.000.000
0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pekanbaru	12	Laporan	3.650.000.000			12	Laporan	4.015.000.000
0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pekanbaru	1	Dokumen	1.350.000.000			1	Dokumen	1.485.000.000
0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pekanbaru	1	Dokumen	1.200.000.000			1	Dokumen	1.320.000.000
0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pekanbaru	1	Dokumen	1.600.000.000			1	Dokumen	1.760.000.000
004	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD**		**5**	**Jenis**	**15.028.424.610**			**5**	**Jenis**	**16.531.267.071**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Tahun n			Target Capaian Kinerja		Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7	(8)	(9)		(10)
0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Pekanbaru	1	Dokumen	300.000.000			1	Dokumen	330.000.000
0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pekanbaru	5	Dokumen	5.531.024.800			5	Dokumen	6.084.127.280
0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pekanbaru	12	Dokumen	2.183.399.810			12	Dokumen	2.401.739.791
0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pekanbaru	75	Orang	3.500.000.000			75	Orang	3.850.000.000
0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Pekanbaru	8	Orang	864.000.000			8	Orang	950.400.000
0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pekanbaru	12	Dokumen	1.200.000.000			12	Dokumen	1.320.000.000
0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Pekanbaru	1	Dokumen	1.450.000.000			1	Dokumen	1.595.000.000
005	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**3**	**Jenis**	**49.535.575.390**			**3**	**Jenis**	**54.489.132.929**
0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Pekanbaru	55	Laporan	9.686.575.730			55	Laporan	10.655.233.303
0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Pekanbaru	1	Dokumen	1.450.000.000			1	Dokumen	1.595.000.000
0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pekanbaru	3	Dokumen	38.398.999.660			3	Dokumen	42.238.899.626
006	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Jenis Pengawasan Kode Etik DPRD**		**1**	**Jenis**	**1.000.000.000**			**1**	**Jenis**	**1.100.000.000**
0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Pekanbaru	1	Dokumen	500.000.000			1	Dokumen	550.000.000
0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pekanbaru	1	Laporan	500.000.000			1	Laporan	550.000.000
007	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Jenis Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**2**	**Jenis**	**1.870.000.000**			**2**	**Jenis**	**2.057.000.000**
0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Pekanbaru	12	Dokumen	895.000.000			12	Dokumen	984.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju (Rencana Tahun 2024)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Tahun n			Target Capaian Kinerja		Tahun n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7	(8)	(9)		(10)
0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Pekanbaru	12	Dokumen	975.000.000			12	Dokumen	1.072.500.000
008	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD**		**5**	**Jenis**	**35.860.579.428**			**5**	**Jenis**	**39.446.637.371**
0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pekanbaru	148	Dokumen	21.643.539.428			148	Dokumen	23.807.893.371
0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Pekanbaru	1	Laporan	100.000.000			1	Laporan	110.000.000
0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pekanbaru	1	Dokumen	2.200.000.000			1	Dokumen	2.420.000.000
0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pekanbaru	57	Dokumen	9.000.000.000			57	Dokumen	9.900.000.000
0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Pekanbaru	1	Dokumen	2.917.040.000			1	Dokumen	3.208.744.000
Jumlah						**267.663.401.200**					**294.429.741.320**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan rencana Program dan Kegiatan yang tertuang pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2023, maka disusun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Riau

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Keglatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	2				SEKRETARIAT DPRD								258.196.054.304					280.890.993.091
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								113.811.005.095					124.134.447.950
4	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27.554.683.080					27.725.752.974
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	200 Orang/ Bulan	100 Persen	27.554.683.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	27.725.752.974
4	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								280.000.000					343.200.000
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 Persen	280.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	343.200.000
4	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								6.821.829.968					7.525.893.761
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	324.175.026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	380.238.934
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Paket	100 Persen	1.077.584.534	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	1.185.348.827

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	199.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	220.000.000
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	2.409.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	2.650.406.000
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	448.956.468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	493.900.000
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	410.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	451.000.000
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	48 Laporan	100 Persen	1.951.703.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	2.145.000.000
4	2	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								2.720.090.760					2.915.000.000
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	797.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	220.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Unit	100 Persen	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	330.000.000
4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 Persen	434.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	550.000.000
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 Unit	100 Persen	1.040.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	1.650.000.000
4	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Unit	100 Persen	149.090.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	165.000.000
4	2	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								6.351.617.612					8.085.000.000
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	275 Laporan	100 Persen	102.825.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	77.000.000
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	52 Laporan	100 Persen	1.599.998.904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	1.760.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	99.997.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	110.000.000
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	4.548.796.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	6.138.000.000
4	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.684.408.000					4.473.434.600
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	226.630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	249.293.000
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	69 Unit	100 Persen	1.815.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	2.261.941.000
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Unit	100 Persen	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	55.000.000
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 Unit	100 Persen	48.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	55.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit	100 Persen	1.081.388.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	1.189.700.600
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Unit	100 Persen	124.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	137.500.000
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Unit	100 Persen	342.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	525.000.000
4	**2**	**1**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**63.156.610.675**					**69.422.166.615**
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	65 Orang/ Bulan	100 Persen	61.002.424.425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	67.102.666.868
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Paket	100 Persen	1.753.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	1.885.000.000
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	65 Orang	100 Persen	391.186.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	434.499.747

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	2	1	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**								**3.241.765.000**					**3.644.000.000**
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Laporan	100 Persen	401.765.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	520.000.000
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	220.000.000
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	2.640.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	100 Persen	2.904.000.000
4	2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**144.325.049.209**					**156.756.545.141**
4	2	2	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**								**11.256.964.960**					**13.176.375.000**
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	3.166.748.460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	4.950.000.000
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	5.509.424.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5.500.000.000
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	456.417.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	2.065.637.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	2.165.637.500
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	58.737.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	60.737.500
4	2	2	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								6.728.750.725					7.860.000.000
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	812.955.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.010.000.000
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	834.921.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.010.000.000
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	864.578.965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.010.000.000
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	961.358.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.210.000.000
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1.643.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.810.000.000
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.631.695.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.810.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	2	2	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**3.922.525.055**					**4.714.005.000**
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	114.725.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	214.725.000
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	114.725.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	214.725.000
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	114.725.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	214.725.000
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	114.725.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	214.725.000
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	114.725.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	214.725.000
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.436.851.820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.485.000.000
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	295.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	395.380.000
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.616.668.235	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.760.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**2**	**2**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**17.919.255.399**					**18.884.612.071**
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	6.084.003.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	6.284.127.280
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	4.212.906.849	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	4.401.739.791
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Orang	100 Persen	5.400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5.550.000.000
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Orang	100 Persen	864.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	950.400.000
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.320.000.000
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	358.345.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	378.345.000
4	**2**	**2**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**58.313.300.880**					**62.413.300.880**
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	55 Laporan	100 Persen	29.752.516.975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	31.752.516.975
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	117.174.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan	100 Persen	217.174.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						tugas dan fungsi DPRD			Semua Kelurahan							tugas dan fungsi DPRD		
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	28.443.609.405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	30.443.609.405
4	2	2	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								1.094.829.790					1.204.829.790
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	40.037.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	50.037.300
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1.054.792.490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.154.792.490
4	2	2	1.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**								68.975.000					72.975.000
4	02	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	37.325.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	39.325.000
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	31.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	33.650.000
4	2	2	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**								45.020.447.400					48.430.447.400
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	81 Dokumen	100 Persen	31.124.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	33.124.770.000
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	116.269.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan	100 Persen	126.269.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						tugas dan fungsi DPRD			Semua Kelurahan							tugas dan fungsi DPRD		
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.593.523.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1.893.523.300
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	59 Dokumen	100 Persen	10.250.889.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	11.250.889.600
4	02	02	1.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.925.994.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	2.025.994.800
TOTAL													258.136.054.304					280.890.993.091

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan hal yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak terlepas dari rencana efisiensi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai kebijakan rasionalisasi anggaran terhadap menurunnya kemampuan keuangan daerah dan penyesuaian prioritas anggaran daerah, hal ini mengakibatkan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Optimalisasi yang diperlukan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja guna mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan Dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang disusun berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023 telah dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan guna menjadi tolok ukur bagi proses pencapaian keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2023 telah menetapkan 4 (empat) program, dan selanjutnya program yang ditempuh akan diimplementasikan dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan. Keluaran dan hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan konstribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja berikutnya.

Pekanbaru, 26 September 2022

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790704 199810 1 001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 719, Telp. (0761) 857122, 857166 Fax. (0761) 857141
PEKANBARU

KEPUTUSAN
Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts. /SEKR/DPRD/2022

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCAN.A KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2023 serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan berkompeten untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);

19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU**

PERTAMA : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Riau dimaksud dalam diktum ke satu keputusan ini, dapat melaksanakan tugas secara penuh tanggung jawab dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : September 2022

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU

TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790704 199810 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. /SEKR/DPRD/2022
TANGGAL : September 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tengku Fauzan Tambusai, S.STP	Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	T. Aznom Zaifani, SE, ME	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Ketua
3.	Khuzairi, S.Sos	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Wakil Ketua
4.	T. Ikhsan, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Umum	Sekretaris
5.	Ovan Rachamadano	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
6.	Edwin Noviansyah, S.STP, M.Si	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
7.	Rio Armanda, S.Kom	Fungsional Perencana Muda	Anggota
8.	Yurikha Heriandanni, S.STP, M.Si	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
9.	Wira Setiadi, S.STP, M.PA	Fungsional Perisalah Legislatif Muda	Anggota
10.	Reno Afriadi, SH	Fungsional Analis Hukum Muda	Anggota
11.	Tengku Rina Melati, S.Sos	Kasubbag Umum dan Protokol	Anggota
12.	Fernanda Theodora, S.STP, M.Si	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
13.	Perdana Novalita, S.STP, M. Si	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
14.	Siska Fitriyani Syamsuddin, S.STP	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
15.	Rio Saputra	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : September 2022

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU

TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790704 199810 1 001

FORM VERIFIKASI DOKUMEN
RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN 2023

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
1	**COVER**	JUDUL COVER : **"RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DINAS/BADAN.....** (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	✓		
2	**PERGUB PENETAPAN**	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2023	-	-	
3	**DAFTAR ISI**	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	✓		
4	**DAFTAR TABEL**	Judul Tabel dan Halaman Tabel	✓		
5	**BAB I PENDAHULUAN**				
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	✓		
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓		Dasar Hukum belum memuat : 1. Inpres Nomor 9/2000 ttg Pengarusutamaan Gender 2.PP 2/2018 ttg SPM 3.PP 72/2019 ttg Perubahan PP 18/2016 4.PP 59/2017 ttg Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5.PP 18/2020 ttg RPJMN 2020-2024 6.6. Permendagri 59/2021 ttg Penerapan SPM 7.Pergub Riau 35/2022 ttg RKPD Provinsi Riau Tahun 2023

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	✓		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓		
6	**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Menggunakan **Tabel T-C.29**	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Menggunakan **Tabel T-C.30**	✓		Memasukkan data terpilah persamaan gender dengan disagregasi data seperti jenis kelamin, kelompok rentan, anak, lansia dan disabilitas didalam kinerja pelayanan PD
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development*	✓		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.			
	2.4. Review terhadap RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda; Menggunakan **Tabel T-C.31**		✓	Analisa kebutuhan berdasarkan usulan Rencana Awal RKPD harus diperkuat dengan justifikasi yang lengkap.
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Menggunakan **Tabel T-C.32**	-	-	
7	**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓		
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓		Sudah menggunakan tujuan dan sasaran sesuai Pergub 61/2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Lingkungan Pemprov Riau

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan **Tabel T-C.33**	✓		Untuk dimasukan kedalam dokumen terkait kegiatan kegiatan yang ada sudah mengakomodi PUG gender
8	**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**				
		Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> Penetapan - Penetapan RKPD 2023.			
9	**BAB V PENUTUP**	1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut. **4.** Pada bagian lembar terakhir dicantumkan **tempat** dan **tanggal** dokumen, **nama Perangkat Daerah** dan **nama** dan **tanda tangan kepala Perangkat Daerah**, serta **cap** perangkat daerah yang bersangkutan.	✓		Sudah sesuai sambil menunggu tanda tangan **kepala Perangkat Daerah**, serta **cap** perangkat daerah yang bersangkutan.
10	**LAMPIRAN**	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja PD pada tahapan sebelumnya.		✓	Menyusul

Pekanbaru, September 2022

Verifikator :

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN
PERENCANAAN

T. AZNOM ZAIFANI, SE, ME
NIP. 19791214 200212 1 003

SUBKOORDINATOR
SUB BAGIAN PERENCANAAN

RIO ARMANDA, S.Kom
NIP. 19850916 201102 1 002

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA,

HERIYANTO, S.Hut, MT
NIP. 19711126 199803 1 006

SUBKOORDINATOR BIDANG PEMERINTAHAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

ARI DIANUARI, ST
NIP. 19810103 200902 1 002